

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.Mrj atas nama terdakwa Adrimon Pgl. Ad dan Putusan Perkara Pidana Nomor : 57/Pid.Sus/2014/PN.Mrj atas nama terdakwa Rudi Hartono, S.Sos. Pgl. Rudi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung memutuskan keduanya bersama-sama (*deelneming*) melakukan tindak pidana pembalakan liar. Terdakwa Adrimon Pgl. Ad melakukan perbuatan tindak pidana pembalakan liar, dengan cara mengangkut kayu setengah jadi tanpa dilengkapi dokumen resmi atau sah. Mengemudikan mobil Truck Hino BA 1174 VA warna hijau yang membawa kayu tersebut. Majelis hakim memutuskan terdakwa Adrimon Pgl. Ad berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*). Seseorang dikatakan sebagai *pleger*, diperlukan keterlibatan minimal orang lainnya, baik secara psikis misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur, atau terlibat secara fisik misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa Adrimon Pgl. Ad tidak bisa dikatakan sebagai *pleger* dalam melakukan tindak pidana pembalakan liar ini, sebab tidak ditanggapnya atau diperiksanya kesaksian Edi (pemilik kendaraan, bos terdakwa Adrimon) yang secara fakta hukum dipersidangan terlibat, baik secara psikis ataupun fisik yang

sebagai penganjur dan menyuruh pelaku untuk mengangkut kayu ke tempat kayu tersebut berada. Bahwa secara teoritis penyertaan atau *deelneming* tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung tidak bisa memutuskan terdakwa Adrimon Pgl. Ad sebagai *pleger* karena syarat utamanya adalah diperlukan kesaksian atau keterlibatan orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*) atau orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Disamping itu, perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana. Selanjutnya, terhadap terdakwa Rudi Hartono S.Sos. Pgl. Rudi, Majelis Hakim memutuskan sebagai orang yang sengaja turut serta melakukan (*mede pleger*) tindak pidana pembalakan liar secara bersama-sama (*deelneming*) ini, dengan cara melakukan perbuatan mengiringi dengan maksud mengawal mobil Truck Hino BA 1174 VA warna hijau yang dikendarai oleh terdakwa Adrimon Pgl. Ad. Bahwa perlu diperhatikan kembali, turut serta melakukan (*mede pleger*) ialah orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Turut serta dalam hal melakukan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*), sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) suatu peristiwa pidana. Jadi berdasarkan hal demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung tidak dapat memutuskan terdakwa Rudi Hartono S.Sos. Pgl. Rudi sebagai orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*), karena tidak adanya orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan lainnya (*mede pleger*) dalam melakukan tindak pidana pembalakan liar ini, ditambahkan terdakwa Adrimon Pgl. Ad tidak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) menimbulkan kendala-kendala. Pertama, masalah yuridis. (a) adanya batasan waktu. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan jangka waktu pemeriksaan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pelimpahan perkara ke pengadilan. Keterbatasan waktu ini, menjadi kendala bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung untuk mencari kebenaran materil di persidangan, (b) Perihal Beban Pembuktian. Bahwa dalam acara pidana, Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya dan upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Kenyataannya, dipersidangan ketidakcukupan bukti-bukti yang dihadapkan di persidangan membuat Majelis hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung kesulitan menentukan pertanggungjawaban pidana pada pelaku. Kedua, masalah non-yuridis. Ada pihak lain yang terlibat, namun tidak ditindaklanjuti oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung. Hal ini mengakibatkan terputusnya hubungan antara pelaku lain yang ikut melakukan dan yang utama adalah pelaku utama dibalik terjadinya tindak pidana pembalakan liar ini.

## **B. Saran**

Bertolak dari temuan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*), maka perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana pembalakan liar sudah mengakibatkan kerugian triyulan rupiah, kerusakan hutan, bencana lingkungan, dan ekologi. Dalam hal penegakan hukum, hendaknya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan pelaku tindak pidana pembalakan liar memiliki komitmen kuat untuk memberantasnya. Selain itu, hal terpenting adalah terintegrasi mulai tahap penyidikan sampai tahap persidangan di pengadilan. Sehingga tidak menimbulkan kelemahan koordinasi dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar. Kesulitan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pembalakan liar tidak terjadi. Capainya adalah bukan menjerat orang-orang kelas bawah, tetapi menjerat pelaku yang berada dibelakang kasus tersebut. Dalam hal sanksi pidana, *ultimum remedium* merupakan hal yang cocok terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun kenyataannya, masih banyak sanksi pidana *preum remedium* yang diterapkan. Oleh sebab itu, ketelitian dalam mencari kebenaran materil terhadap fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sangat dibutuhkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Inilah yang menjadi catatan dalam penegakan hukum pembalakan liar di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dan Pengadilan di seluruh Indonesia,

2. Bahwa masih sulit dan tidak diatur secara khusus untuk menembus keterlibatan pelaku tindak pidana pembalakan liar yakni pelaku intelektual, terutama oknum pejabat, cukong kayu, aparat hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kendala inilah yang menjadi kesulitan untuk menentukan pelaku demi pertanggungjawaban pidananya. Ketentuan pidana kehutanan hanya efektif diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana pembalakan liar, dalam hal ini

antara lain : sopir truk, penebang kayu, orang yang membawa kayu. Selanjutnya, jangka waktu dalam proses pembuktian semestinya membutuhkan waktu yang panjang, sebab tindak pidana pembalakan liar merupakan kejahatan yang luar biasa. Untuk itulah, hakim didorong untuk meningkatkan kemampuan secara aktif dalam memutus pelaku tindak pidana pembalakan liar dengan tegas. Terakhir, dengan kebutuhan hukum sekarang, sangat dibutuhkan peradilan *ad hoc* untuk menangani kasus-kasus tindak pidana pembalakan liar ini baik di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung maupun Pengadilan di seluruh Indonesia.

